

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

1. Letak Geografis

Kabupaten Jombang mempunyai letak yang sangat strategis, karena berada pada bagian tengah Jawa Timur dan dilintasi Jalan Arteri Primer Surabaya-Madiun dan Jalan Kolektor Primer Malang-Babat. Secara geografis Kabupaten Jombang terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada antara 5°20'01" sampai 5°30'01" Bujur Timur dan 07°24'01" dan 07°45'01" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.159,50 km². Pusat kota Jombang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km (1,5 jam perjalanan) dari barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur.

Secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area, yaitu:

- a. Bagian utara, terletak di sebelah utara Sungai Brantas, meliputi sebagian besar Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh, dan sebagian Kecamatan Ngusikan dan Kecamatan Kudu. Merupakan daerah perbukitan kapur yang landai dengan ketinggian maksimum 500 meter di atas permukaan laut. Perbukitan ini merupakan ujung timur Pegunungan Kendeng.
- b. Bagian tengah, yakni di sebelah selatan Sungai Brantas, merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan hingga 15%. Daerah ini merupakan kawasan pertanian dengan jaringan irigasi yang ekstensif serta kawasan permukiman penduduk yang padat.
- c. Bagian selatan, meliputi Kecamatan Wonosalam dan sebagian Kecamatan Bareng dan Mojowarno. Merupakan daerah pegunungan dengan kondisi wilayah yang bergelombang. Semakin ke tenggara, semakin tinggi. Hanya sebagian Kecamatan Wonosalam yang memiliki ketinggian di atas 500 meter.

Sungai Brantas merupakan sungai terbesar di Jawa Timur, "membelah" Kabupaten Jombang menjadi dua bagian: bagian utara (24%) dan bagian selatan

(76%), sepanjang ± 44 km. Sungai-sungai lain yang signifikan adalah Sungai Marmoyo (23 km), Sungai Ngotok Ring Kanal (27 km), Sungai Konto (14 km), Sungai Gunting (12 km), dan Sungai Jurangjero (12 km).

Faktor penting yang sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah, diantaranya adalah aliran sungai yang cukup besar dan material hasil letusan gunung berapi. Dimungkinkan bahwa hasil letusan Gunung Kelud terbawa arus deras Sungai Brantas, Kali Konto dan sungai-sungai lainnya yang mengalir dari selatan/tenggara ke utara masuk melintasi wilayah Kabupaten Jombang. Penggunaan tanah di Kabupaten Jombang didominasi oleh sawah mencapai 42,19% dari luas wilayah kabupaten, kemudian permukiman/perumahan 24,08%, hutan 19,46 %, tegal 11,62% dan penggunaan lainnya 2,65%.

Kabupaten Jombang memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 27° - 34° celcius. Di kawasan pegunungan, suhu cukup sejuk (22° celcius). Menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten Jombang termasuk tipe iklim B (basah). Curah hujan rata-rata per tahun adalah 1.625 milimeter. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan, wilayah Kabupaten Jombang tergolong beriklim sedang sampai basah. Di bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar. Dimana tipe ini biasanya musim penghujan jatuh pada bulan Oktober sampai April dan musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober.

Keadaan iklim khususnya curah hujan di Kabupaten Jombang yang terletak pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut mempunyai curah hujan relatif rendah yakni berkisar antara 1750 - 2500 mm pertahun. Sedangkan untuk daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut, rata-rata curah hujannya mencapai 2500 mm pertahunnya.

Kabupaten Jombang memiliki potensi pertanian, perkebunan dan kehutanan. Daerah utara banyak digunakan untuk perkebunan pandan. Daerah tengah sangat produktif untuk tanaman padi dan palawija. Sedangkan Daerah selatan banyak ditanami pinus, kopi dan cengkeh karena berada di areal pegunungan.

3. Pembagian Administratif

Secara administrasi Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta meliputi 1.258 dusun. Ditinjau dari komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Sumobito memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 21 desa. Namun bila ditinjau dari luas wilayah, terdapat 3 kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan luas 121,63 km², Kecamatan Plandaan dengan luas 120,40 km² dan Kecamatan Kabuh dengan luas 97,35 km².

Tabel 1
Luas wilayah kecamatan dan Jumlah desa/kelurahan Kabupaten Jombang pada Tahun 2008

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (km ²) | Jumlah Desa/Kelurahan |
|-----|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Bandarkedungmulyo | 32,50 | 11 |
| 2. | Perak | 29,05 | 13 |
| 3. | Gudo | 34,39 | 18 |
| 4. | Diwek | 47,70 | 20 |
| 5. | Ngoro | 49,86 | 13 |
| 6. | Mojowarno | 78,62 | 19 |
| 7. | Bareng | 94,27 | 13 |
| 8. | Wonosalam | 121,63 | 9 |
| 9. | Mojoagung | 60,18 | 18 |
| 10. | Sumobito | 47,64 | 21 |
| 11. | Jogoroto | 28,28 | 11 |
| 12. | Peterongan | 29,47 | 14 |
| 13. | Jombang | 36,40 | 20 |
| 14. | Megaluh | 28,41 | 13 |
| 15. | Tembelang | 32,94 | 15 |
| 16. | Kesamben | 51,72 | 14 |
| 17. | Kudu | 77,75 | 11 |
| 18. | Ngusikan | 34,98 | 11 |

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (km ²) | Jumlah Desa/Kelurahan |
|-----|-----------|------------------------------------|--------------------------|
| 19. | Ploso | 25,96 | 13 |
| 20. | Kabuh | 97,35 | 14 |
| 21. | Plandaan | 120,40 | 13 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

4. Pemerintahan

a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jombang

Aparatur pemerintah pada era otonomi daerah merupakan kunci penentu di dalam kelancaran pelaksanaan pemerintahan terutama di dalam upaya mengimplementasikan visi, misi pembangunan yang dituliskan sebagai berikut:

Visi Kabupaten Jombang

Berdasarkan kondisi umum Kabupaten Jombang saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa mendatang, maka visi pembangunan Kabupaten Jombang yaitu:

" Menuju Kabupaten Jombang yang agamis, mandiri, berdaya saing dan sejahtera tahun 2009 " (Jombangkab.go.id,2009)

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jombang tersebut maka ditempuh dengan misi Kabupaten Jombang yaitu:

“Memberdayakan potensi daerah yang berbasis sumber daya local melalui penyediaan sarana dan prasarana wilayah dan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan serta ditunjang dengan profesionalisme aparatur pemerintah dan mobilisasi sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien”

Tujuan dari visi dan misi dari Kabupaten Jombang tersebut, adalah:

- a. Misi Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik
- b. Misi Memberdayakan Potensi Daerah Berbasis Sumberdaya Lokal
- c. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah
- d. Mewujudkan Ciri Khas Wilayah yang Berbasis Agraris

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Jombang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 12.285 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah PNS Kabupaten Jombang menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2008

| No. | Pendidikan tertinggi yang ditamatkan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Dalam Persen (%) |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 1. | SD | 349 | 16 | 365 | 2,5% |
| 2. | SLTP sederajat | 350 | 63 | 413 | 4% |
| 3. | SLTA sederajat | 1.988 | 1.743 | 3.731 | 30% |
| 4. | DI/DII/DIII/Akademi | 647 | 895 | 1.542 | 13% |
| 5. | SI | 3.260 | 2.751 | 6.011 | 49% |
| 6. | S2/S3 | 134 | 28 | 162 | 1% |
| 7. | Sarjana Muda | 33 | 28 | 61 | 0.5% |
| | Jumlah | 6.761 | 5.524 | 12.285 | 100% |

Sumber: Badan Kepegawaian Kabupaten Jombang

Pada tahun 2008 jumlah aparatur pemerintah (PNS) di Kabupaten Jombang sebesar 12.285 orang, sebgaiian besar , mempunyai tingkat pendidikan S-I, yaitu sebanyak 49%, sedangkan DI/DII/DIII/akademi sebanyak 13%. Tingkat pendidikan SLTA atau sederajat sebanyak 30%, berpendidikan SLTP atau sederajat sebanyak 4%. Berpendidikan SD sebanyak 2.5%, sedangkan untuk S2/S3 sebanyak 1%. Sisanya sebanyak 0,5% orang adalah sarjana muda.

5. Penduduk Kabupaten Jombang

a. Demografi

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, Jumlah penduduk Kabupaten Jombang adalah 1.340.229 jiwa (s/d Mei 2008) Sedikitnya 55% penduduk tinggal di wilayah perkotaan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jombang sebesar 997 jiwa/km². Konsentrasi sebaran penduduk terutama di Kecamatan Jombang (dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni 3.198 jiwa/km²), Kecamatan Tembelang (bagian selatan), Kecamatan Peterongan (bagian tengah dan selatan), Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Mojowarno (bagian utara dan timur), sepanjang jalan raya Jombang-Peterongan-Mojoagung-Mojokerto, serta sepanjang jalan raya Jombang-

Diwek-Blimbing-Ngoro-Kandangan. Kawasan padat penduduk lainnya adalah kawasan perkotaan di kecamatan Ploso, Perak, dan Ngoro. Bagian barat laut (yang merupakan perbukitan kapur) dan bagian tenggara (yang merupakan daerah pegunungan) merupakan kawasan yang memiliki kepadatan penduduk jarang. Pertumbuhan penduduk sebesar 0,68% per tahun, sehingga Kabupaten Jombang tidak mengalami permasalahan ledakan penduduk.

b. Etnis dan Bahasa

Penduduk Jombang pada umumnya adalah etnis Jawa. Namun demikian, terdapat minoritas etnis Tionghoa dan Arab yang cukup signifikan. Etnis Tionghoa umumnya tinggal di perkotaan dan bergerak di sektor perdagangan dan jasa.

Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Jawa yang dituturkan banyak memiliki pengaruh Dialek Surabaya yang terkenal egaliter dan blak-blakan. Kabupaten Jombang juga merupakan daerah perbatasan dua dialek Bahasa Jawa, antara Dialek Surabaya dan Dialek Mataraman. Beberapa kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kediri memiliki pengaruh Dialek Mataraman yang banyak memiliki kesamaan dengan Bahasa Jawa Tengahan. Salah satu ciri khas yang membedakan Dialek Surabaya dengan Dialek Mataraman adalah penggunaan kata arek (sebagai pengganti kata bocah) dan kata cak (sebagai pengganti kata mas).

c. Agama

Agama Islam dianut oleh 98% penduduk Kabupaten Jombang, diikuti dengan agama Kristen Protestan (1,2%), Katolik (0,3%), Buddha (0,09%); Hindu (0,07%), dan lainnya (0,02%). Jombang juga dikenal dengan sebutan "kota santri", karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya. Kehidupan beragama di Kabupaten Jombang sangat toleran. Di Kecamatan Mojowarno, atau sekitar 8 km dari Ponpes Tebuireng, merupakan kawasan dengan pemeluk agama Kristen yang signifikan, dan daerah tersebut pernah menjadi pusat penyebaran salah satu aliran agama Kristen Protestan pada era Kolonial Belanda. Agama Hindu juga dianut sebagian penduduk Jombang, terutama di kawasan tenggara (Wonosalam, Bareng, dan Ngoro).

Selain itu, Kabupaten Jombang memiliki dua kelenteng, yakni Hok Liong Kiong di Kecamatan Jombang dan Hong San Kiong di Kecamatan Gudo (yang didirikan tahun 1700).

6. Lembaga Pendidikan

Kabupaten Jombang memiliki sejumlah perguruan tinggi, di antaranya: Universitas Darul Ulum (UNDAR), STKIP PGRI Jombang, STIE PGRI Dewantara, Universitas Bahrul Ulum, Intitut Keislaman Hasyim Asy'ari (Ikaha), Universitas Pesantren Darul Ulum (UNIPDU), STIKES Pemkab Jombang, STIKES ICME, serta sejumlah akademi. Universitas Darul Ulum merupakan perguruan tinggi terkemuka di Jombang.

Pada tahun 2005, Kabupaten Jombang terdapat 560 SD negeri dan 22 SD swasta; 46 Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan 86 SMP swasta; 12 SMA negeri dan 37 SMA swasta; 7 SMK negeri dan 39 SMK swasta. Sementara, untuk sekolah formal Islam, terdapat 5 MI negeri dan 257 MI swasta; 17 MTs negeri dan 102 MTs swasta; serta 10 MA negeri dan 65 MA swasta. Sekolah favorit di Kabupaten Jombang untuk tingkat SD adalah SDN Kepanjen 2, SDN Jombatan 3, dan SD Islam Roushon Fikr, untuk tingkat SMP adalah SMP Negeri 1 Jombang dan SMP Negeri 2 Jombang, sedang untuk tingkat SMA adalah SMA Negeri 2 Jombang dan SMA Unggulan Darul Ulum.

7. Perekonomian Kabupaten Jombang

a. Pertanian

Sektor pertanian menyumbang 38,16% total PDRB Kabupaten Jombang. Meski nilai produksi pertanian mengalami peningkatan, namun kontribusi sektor ini mengalami penurunan. Sektor pertanian digeluti oleh sedikitnya 31% penduduk usia kerja. Tradisi, kemudahan yang disediakan oleh alam, dan adanya terobosan baru rupanya menjadikan alasan untuk bertahan. Kesuburan tanah di sini konon dipengaruhi oleh material letusan Gunung Kelud yang terbawa arus deras Sungai Brantas dan Kali Konto serta sungai-sungai kecil lainnya. Sistem pengairan juga sangat ekstensif dan memadai, dan 83% diantaranya merupakan irigasi teknis.

Sedikitnya 42% lahan di Jombang digunakan sebagai area persawahan. Letaknya di bagian tengah kabupaten dengan ketinggian 25-100 meter dpl.

Lokasi ini ditanami tanaman padi serta palawija seperti jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Komoditas andalan tanaman pangan Kabupaten Jombang di tingkat propinsi adalah padi, jagung, kacang kedelai dan ubi kayu. Besarnya produksi padi telah menempatkan Jombang sebagai daerah swasembada beras di provinsi Jawa Timur.

Di bagian utara merupakan sentra buah-buahan seperti mangga, pisang, nangka, dan sirsak. Kecamatan Wonosalam juga merupakan sentra buah-buahan terutama Durian Bido. Kecamatan Perak merupakan penghasil utama jeruk nipis, yang diunggulkan karena tipis kulitnya serta banyak airnya.

b. Perkebunan

Komoditas andalan perkebunan Kabupaten Jombang di tingkat propinsi adalah tebu. Sedang di tingkat regional, komoditas unggulan adalah serat karung, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, randu, tembakau, dan beberapa tanaman Toga (lengkuas, kencur, kunyit, jahe, dan serai). Tebu merupakan bahan mentah utama industri gula di Jombang, (dimana Jombang memiliki dua pabrik gula). Perkebunan tebu tersebar merata di dataran rendah dan dataran tinggi Kabupaten Jombang. Daerah pegunungan di sebelah tenggara (terutama Kecamatan Wonosalam) merupakan sentra tanaman perkebunan kopi, kakao, dan cengkeh. Daerah pegunungan di utara merupakan penghasil utama tembakau di Jombang.

c. Kehutanan

Hampir 20% wilayah Kabupaten Jombang merupakan kawasan hutan. Kawasan hutan tersebut terdapat di bagian utara (kecamatan Plandaan, Kabuh, Kudu, dan Ngusikan) serta bagian tenggara Kabupaten Jombang (kecamatan Wonosalam, Bareng, dan Mojowarno). Di wilayah hutan Kabupaten Jombang, 61% merupakan hutan produksi, 23% hutan tebang pilih, 15% hutan wisata, dan 1,5% merupakan hutan lindung. Kayu jati adalah komoditas unggulan subsektor kehutanan di Kabupaten Jombang.

d. Peternakan dan perikanan

Komoditas peternakan Kabupaten Jombang meliputi ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras, sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, dan itik. Ayam pedaging merupakan komoditas unggulan peternakan di

tingkat propinsi. Beberapa perusahaan menengah bergerak di bidang peternakan. Mengingat lokasi Kabupaten Jombang yang bukan kawasan pantai, perikanan perairan umum dan kolam merupakan komoditas unggulan di bidang perikanan.

e. Perdagangan

Sektor perdagangan menyumbang PDRB kabupaten terbesar kedua setelah pertanian. Majunya pertanian di Jombang rupanya turut menggerakkan sektor perdagangan. Kabupaten Jombang merupakan salah satu penyuplai utama komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki 17 pasar umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, serta 12 pasar hewan. Kota Jombang sendiri memiliki Pasar Legi Citra Niaga, Pasar Pon, Pasar Loak, dan Pasar Burung. Perdagangan retail dilayani oleh berbagai pusat perbelanjaan serta supermarket besar maupun kecil. Di samping Pasar Legi Citra Niaga, dua kawasan ruko yang terbesar adalah Kompleks Simpang Tiga dan Kompleks Cempaka Mas. Selain kota Jombang, kawasan pusat komersial regional di Kabupaten Jombang terdapat di Mojoagung, Ploso, dan Ngoro.

f. Industri manufaktur

Sektor industri manufaktur menyumbang PDRB kabupaten terbesar ketiga setelah pertanian dan perdagangan. Majunya industri di Jombang ditopang oleh kemudahan transportasi, serta letak Kabupaten Jombang yang strategis, yakni berada di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa dan bersebelahan dengan kawasan segitiga industri Surabaya-Mojokerto-Pasuruan.

Industri besar di Kabupaten Jombang yang merambah pasar luar negeri diantaranya adalah PT Pei Hai Wiratama Indonesia (produk sepatu, topi dan T-Shirt dengan brand "Diadora" dan "Fila") di Jogoloyo (Jogoroto); PT Japfa Comfeed (produk makanan ternak) di Tunggorono (Jombang); PT Usmany Indah (produk kayu olahan), MKS-Sampoerna (produk rokok) di Ploso dan Ngoro, PT Cheil Jedang Indonesia (produk industri kimia setengah jadi) di Jatigedong (Ploso); PT Cheil Jedang Superfeed (produk pakan ternak) di Mojoagung, PT Mentari International (produk mainan anak) di Tunggorono

(Jombang), serta PT Seng Fong Moulding Perkasa (produk ubin kayu). Kabupaten Jombang juga memiliki dua pabrik gula: PG Djombang Baru di Kecamatan Jombang dan PG Tjoekir di Kecamatan Diwek.

Sebanyak 96% industri manufaktur di Kabupaten Jombang merupakan industri kecil, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 60%. Industri kecil yang merambah pasar luar negeri adalah industri kerajinan manik-manik kaca (di Desa Plumbon-Gambang, Kecamatan Gudo) dan industri kerajinan cor kuningan (di Desa Mojotrisno, Mojoagung). Kedua kerajinan tersebut adalah khas Jombang. Sementara itu, industri kecil lain yang dipasarkan di tingkat nasional antara lain adalah mebelair (di Mojowarno); anyaman tas (di Mojowarno); limun (di Bareng dan Ngoro); serta Kecap "Ikan Dorang", yang merupakan salah satu trade mark Jombang.

g. Pertambangan dan Penggalian

Saat ini Kabupaten Jombang tidak terdapat aktivitas pertambangan. Namun diduga bagian utara dan barat Kabupaten Jombang terdapat deposit minyak bumi. Bahan galian di Kabupaten Jombang antara lain yodium, diatomit, andesit, lempung, dan pasir batu.

B. Penyajian Data

1. Aspek Kelembagaan SATLAK PB Kabupaten Jombang

1.1 Awal pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana

a. SATLAK PB Kabupaten Jombang

Bahwa dalam rangka upaya penanganan bencana dan pengungsi, baik yang ditimbulkan oleh alam ataupun manusia, maka perlu dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana alam. Kelembagaan tersebut adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB). Dasar hukum pembentukan SATLAK PB di Kabupaten Jombang sendiri adalah pada Tanggal 2 Februari 2006 dengan keputusan Bupati Jombang No. 188/26/415.12/2006 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Jombang Tahun 2006. Pertama kali yang dilakukan SATLAK PB Kabupaten Jombang saat pra bencana sebagai bentuk persiapan kelembagaan tersebut adalah memberikan undangan dengan perihal persiapan langkah-langkah untuk menangani bencana alam kepada anggota SATLAK PB yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan. Masing-masing

instansi wajib mengirim dua orang wakilnya untuk menghadiri undangan tersebut. Kegiatan tersebut diadakan saat musim penghujan tiba pada awal Bulan Oktober sampai dengan Bulan April dan diadakan di sekretariat SATLAK PB di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang. Tidak ada kualifikasi yang berarti untuk menjadi anggota SATLAK PB Kabupaten Jombang, hanya saja anggota tersebut langsung ditunjuk oleh Bupati selaku Ketua SATLAK PB dan dijadikan Satuan Tugas (SATGAS) sesuai dengan latar belakang instansi pemerintahan dari anggota yang bersangkutan. Untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas dan dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi SATLAK PB di lapangan maka dibentuklah prosedur tetap SATLAK PB Kabupaten Jombang, sehingga dalam penanganan bencana alam nantinya masing-masing anggota SATLAK PB mampu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal di atas sejalan dengan pernyataan Drs. H. Widjono Suparno sebagai ketua pelaksana harian SATLAK PB Kabupaten Jombang bahwa:

“Tidak ada kualifikasi dalam rekrutmen anggota SATLAK PB Kabupaten Jombang, hanya saja anggota langsung ditunjuk oleh Bupati dan diklasifikasi sesuai dengan darimana anggota instansi pemerintahan tersebut berasal untuk dijadikan Satuan Tugas (SATGAS) SATLAK PB Kabupaten Jombang.” (wawancara, 25 Februari, di ruang kerjanya)

Berikut adalah susunan organisasi dari SATLAK PB Kabupaten

Jombang:

| | |
|--------------------------------|--|
| Ketua | : Bupati Jombang |
| Wakil Ketua I | : Komandan Kodim 0814 Jombang |
| Wakil Ketua II | : Kapolres Jombang |
| Sekretaris | : Sekretaris Daerah |
| Ketua Pelaksana Harian | : Wakil Bupati Jombang |
| Sekretaris Pelaksana Harian I | : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat |
| Sekretaris Pelaksana Harian II | : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kabupaten Jombang |
| Anggota-anggota | : |
| 1. | Kepala Bagian Bina Mitra Polres Jombang |

2. PASI Operasi. KODIM 0814 Jombang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prasarana Jalan Kabupaten Jombang
5. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Jombang
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang
7. Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang
8. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah Kabupaten Jombang
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Jombang
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang
11. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang
12. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang
13. Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang
14. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Jombang
15. Kepala Ranting TELKOM Kabupaten Jombang
16. Kepala Sub DOLOG Kabupaten Jombang
17. Administratur Perum Perhutani KPH Jombang
18. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang
19. Direktur RSUD Swadana Jombang
20. Direktur RSK Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
21. Direktur RSI Jombang
22. Ketua IDI Jombang
23. Ketua PMI Cabang Jombang
24. Ketua ORARI dan RAPI Jombang
25. Ketua LSM Madani Jombang
26. Ketua GP. Ansor Jombang
27. Ketua Pemuda Muhammadiyah Jombang.

Kemudian SATLAK PB Kabupaten Jombang membentuk Satuan Tugas (SATGAS), yang terdiri dari:

1. SATGAS Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

Koordinator : KODIM 0814 Jombang, dengan anggota Polres Jombang, Kantor Polisi Pamong Praja, Perum Perhutani KPH Jombang, Pemadam Mobil Kebakaran, Dinas Pengairan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan dan Pramuka.

2. SATGAS Bantuan Sosial

Koordinator : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial, dengan anggota Bagian Kesejahteraan Sosial, Dinas Perindagkop Jombang, Dinas Pertanian, Dinas Perhutanan dan Perkebunan, Badan Pengawas Daerah, Sub DOLOG Jombang.

3. SATGAS Pengerahan Masyarakat

Koordinator : Kantor Kesbang dan Linmas, dengan anggota Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Pemerintahan, Ormas dan LSM

4. SATGAS Kesehatan

Koordinator : Dinas Kesehatan, dengan anggota PMI Cabang Jombang, RSUD Swadana Jombang, RSI Jombang, RSK Mojowarno, IDI Jombang

5. SATGAS Keamanan

Koordinator : Polres Jombang, dengan anggota KODIM 0814 Jombang, SATRAD Kabuh, Kantor Pol PP, Satuan Polisi Hutan KPH Jombang

6. SATGAS Hubungan dan Angkutan

Koordinator : Dinas Perhubungan, dengan anggota Bagian Umum Pemda Jombang, Bagian Perekonomian Pemda Jombang, dan Organda Kabupaten Jombang

7. SATGAS Informasi dan Komunikasi

Koordinator : Bagian Humas, dengan anggota Bagian Arsip dan PDE Pemda Jombang, ORARI dan RAPI Jombang, PWI dan PERS, serta Ormas dan LSM

8. SATGAS Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Koordinator : BAPPEDA, dengan anggota Dinas PU Prasarana Jalan, Dinas KIMPRASWIL, Dinas Pengairan, Bagian Pembangunan Pemda Jombang, dan Perum Perhutani KPH Jombang

9. SATGAS Perlengkapan dan Dapur Umum

Koordinator : Bagian Umum Pemda Jombang, dengan anggota Kantor Parbupora, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Tim PKK Kabupaten Jombang.

Disamping SATLAK PB Kabupaten, Bupati selaku Ketua SATLAK PB juga membentuk Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (RUPUSDALOPS), sebagai ruang data dan pusat informasi dan pengendalian penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Sekretariat RUPUSDALOPS bertempat di Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Jombang dan RUPUSDALOPS dipimpin oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Jombang. Berikut Susunan Keanggotaan RUPUSDALOPS PB Kabupaten Jombang:

- Ketua : Kepala Kantor Kesbang dan Linmas
Sekretaris : Kasie Linmas Kantor Kesbang dan Linmas
Anggota : 1. PASI Ops. KODIM 0814 Jombang
2. Kabag Ops. Polres Jombang
3. SATRAD 222 Ploso di Kabuh
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
5. Dinas Pemukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah Kabupaten Jombang
6. Dinas Pengairan Kabupaten Jombang
7. Bagian Kesejahteraan Sosial Pemda Jombang
8. Bagian Humas Pemda Jombang
9. PMI Cabang Jombang

b. Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Tingkat Kecamatan.

Unit ini dibentuk untuk menanggulangi bencana secara cepat, apabila terjadi bencana di kecamatan unit ini akan menerima laporan dari Satuan Hansip/Linmas di tingkat Desa atau kelurahan.

Berikut susunan keanggotaan dari Unit Operasi PB Tingkat Kecamatan:

- Ketua : Camat
Wakil Ketua I : DAN RAMIL

Wakil Ketua II : KAPOLSEK
 Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 Pelaksana Harian : Kasie Trantib Kecamatan
 Anggota : Kasie Pemerintahan Kecamatan, PMI ranting
 Kecamatan, UPT Dinas Pengairan, BINMAS Polsek
 BATAUD KORAMIL.

Unit Operasi PB Tingkat Kecamatan, terdiri dari:

1. Unit Penanggulangan Bencana dan Pengungsi

Koordinator : KORAMIL, dengan anggota Polsek, Kasie Pemerintahan Kecamatan, dan KUA Kecamatan.

2. Unit Kesehatan

Koordinator : Kepala Puskesmas, dengan anggota PMI Ranting dan Pramuka

3. Unit Pengerahan Masyarakat

Koordinator : Kasie Humas Kecamatan, dengan anggota UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, Kasie Sosbud Kecamatan

4. Unit Keamanan

Koordinator : Polsek, dengan anggota KORAMIL, Kasie Trantib, dan Pramuka

5. Unit Bantuan Sosial dan Dapur Umum

Koordinator : Kasie Pembangunan dan Perekonomian Desa, Dengan anggota Tim PKK Kecamatan dan ormas yang ada di kecamatan.

Sekretariat Unit Operasi PB Tingkat Kecamatan sendiri berada di Kantor Camat.

c. Satuan Hansip/Linmas di tingkat desa/kelurahan

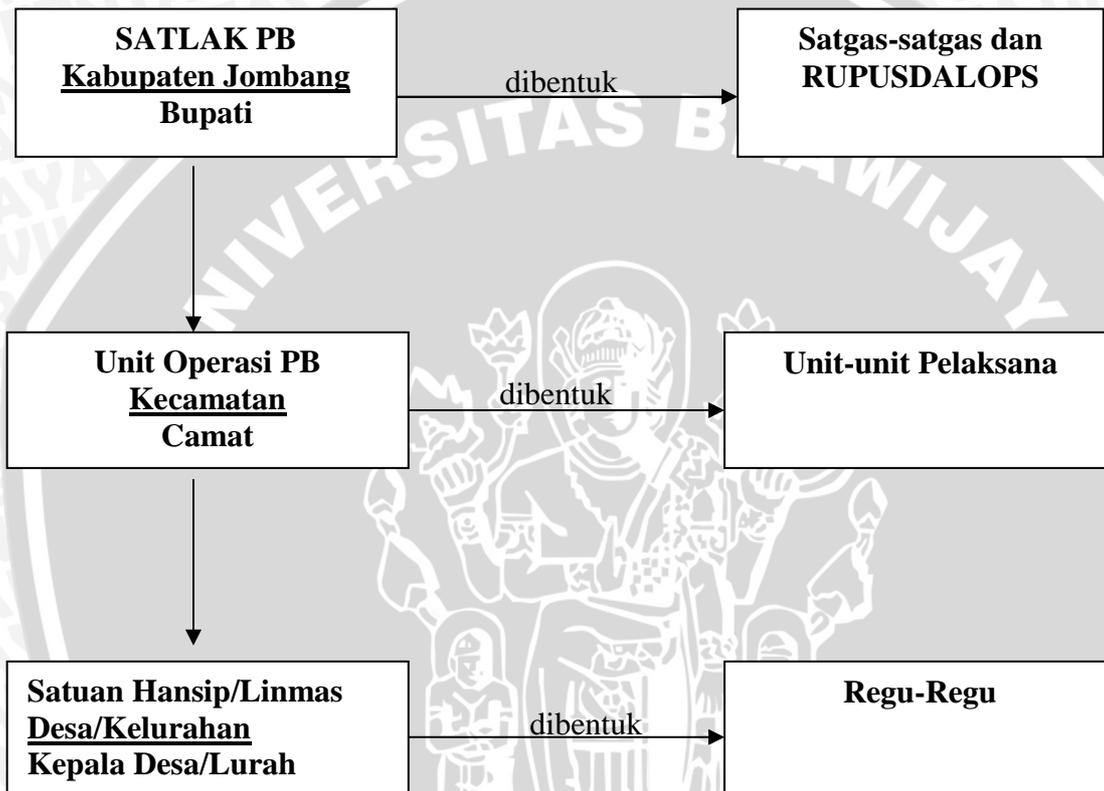
Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di tingkat desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas mengorganisir anggota satuan hansip/linmas dan membentuk regu-regu sesuai dengan kebutuhan penugasan, antara lain:

1. Regu PPPK
2. Regu Tandu
3. Regu Evakuasi
4. Regu Pencarian dan Penyelamatan (SAR)

- 5. Regu Keamanan
- 6. Regu Dapur Umum

Berikut adalah Gambar Kelengkapan Tugas Jajaran Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Jombang.

Gambar 3
Kelengkapan Tugas Jajaran Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana
(SATLAK PB) Kabupaten Jombang



Sumber: Prosedur Tetap SATLAK PB Tahun 2006

1.2 Tugas dan fungsi instansi yang tergabung dalam kelembagaan

a. SATLAK PB Kabupaten Jombang mempunyai tugas:

Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PB dan gubernur selaku ketua SATKORLAK PB, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, serta mencakup kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sedangkan Fungsi dari SATLAK PB Kabupaten Jombang, diantaranya:

- a) Memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya
- b) Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung di daerahnya dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di daerahnya
- c) Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan SATLAK PB terdekat
- d) Penerimaan dan penyuluhan serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana dan pengungsi di daerahnya
- e) Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk gubernur selaku ketua SATKORLAK PB.

Kemudian Satuan Tugas (SATGAS) SATLAK PB, sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur SATLAK PB untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayahnya, apabila Unit Operasi PB kecamatan tidak mampu mengatasinya. SATGAS bersifat sementara, dalam arti ditugaskan apabila diperlukan dan dibubarkan setelah selesai penugasan.

SATGAS mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) SATGAS Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
 - a) Mengamati daerah rawan bencana
 - b) Menyusun perencanaan dan pencegahan untuk daerah rawan bencana
 - c) Mengerahkan personil penanggulangan bencana
 - d) Melakukan penanggulangan secara darurat
 - e) Mengkoordinasikan dalam kegiatan pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban
 - f) Merencanakan dan menyiapkan tempat aman bagi pengungsi di daerah bencana
 - g) Menginventarisir jumlah pengungsi dan kerugian (korban jiwa dan harta benda)

h) Melakukan koordinasi dengan camat dan kepala desa ditempat bencana

2) SATGAS Bantuan Sosial

- a) Merencanakan dan menyusun data kesiapan sarana dan prasarana pendukung penyiapan logistik
- b) Menyusun data kebutuhan bahan, peralatan sarana dan prasarana untuk dilaporkan kepada Ketua Satlak PB
- c) Menyiapkan bantuan logistik agar sewaktu-waktu diperlukan dapat digunakan dengan cepat
- d) Mengkoordinasikan pengadaan, penerimaan, penyiapan, dan penyaluran bantuan kepada pemohon korban bencana yang diterima baik dari instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat.

3). SATGAS Pengerahan Masyarakat

- a) Menyiapkan segala fasilitas untuk keperluan evakuasi masyarakat yang menderita akibat bencana
- b) Menyiapkan fasilitas pengobatan dan tenaga medis bagi korban bencana serta menyiapkan fasilitas penampungan medis yang didukung peralatan medis
- c) Mengkoordinasikan pelayanan dan bantuan medis termasuk penerimaan penderita/korban yang dirujuk dari lokasi bencana dan tempat penampungan penungsi.

4) SATGAS Keamanan

- a) Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengamanan dalam rangka mendukung operasi penanggulangan bencana
- b) Mengamankan daerah bencana dan daerah pengungsian penduduk, jatuhnya korban
- c) Mengkoordinasikan kegiatan pengamanan di lokasi bencana atau tempat pengungsian
- d) Menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan tugasnya
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang digariskan oleh Ketua SATLAK PB

5) SATGAS Informasi dan Komunikasi

- a) Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinir penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bencana, serta cara menanggulangi untuk menghindari/memperkecil korban dan kerugian melalui media cetak dan elektronik maupun penerangan langsung kepada masyarakat
- b) Mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana
- c) Mengkoordinasikan dan mengatur penggunaan perangkat komunikasi dalam operasi penanggulangan bencana di daerah bencana
- d) Bersama SATGAS lain merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah rawan bencana.

6) SATGAS Hubungan dan Angkutan

- a) Menyusun dan merencanakan fasilitas perhubungan dan angkutan dalam rangka operasi penanggulangan bencana
- b) Mengkoordinasikan penggunaan angkutan untuk pengungsi dalam operasi penanggulangan bencana
- c) Melaksanakan tugas lain yang digariskan oleh Ketua SATLAK PB

7) SATGAS Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a) Menyusun rencana kegiatan rehabilitasi mental dan fisik untuk membantu mengembalikan mental dan moril para korban serta membantu para korban untuk dapat segera kembali pada kehidupan dan penghidupan semula
- b) Menyiapkan segala fasilitas dan perbaikan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran operasi penanggulangan bencana
- c) Mengkoordinasikan semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana.

8). SATGAS Perlengkapan dan Dapur Umum

- a) Merencanakan, menyediakan dan melaksanakan pembuatan sarana dan prasarana untuk penampungan masyarakat yang dievakuasi akibat bencana
- b) Merencanakan, menyiapkan dan menyediakan pelayanan makanan dan minuman bagi warga masyarakat yang tertimpa bencana di tempat penampungan sementara yang memenuhi persyaratan
- c) Berkoordinasi dengan SATGAS lain dalam kegiatan pembuatan sarana dan prasarana untuk keperluan penampungan dan penyediaan makanan dan minuman bagi masyarakat yang tertimpa bencana
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang digariskan oleh Ketua SATLAK PB.

b. Unit Operasi PB Kecamatan

Unit Operasi PB kecamatan mempunyai tugas:

Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayahnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh bupati selaku ketua SATLAK PB kabupaten, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana dan pengungsian.

Unit Operasi PB kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Memberikan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengungsian
- 2) Mengkoordinir potensi masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat di wilayahnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi

1.3 Koordinasi instansi yang tergabung dalam kelembagaan

Koordinasi berbagai instansi yang tergabung dalam SATLAK PB Kabupaten Jombang pada pra bencana dilakukan waktu musim penghujan tiba, yakni antara Bulan Oktober sampai dengan Bulan April. Koordinasi bertempat

di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai tempat sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang.

Koordinasi yang dilakukan antara Instansi yang tergabung dalam kelembagaan SATLAK PB Kabupaten Jombang pada saat pra bencana berupa:

- a) Mengadakan rapat yang membahas tentang persiapan-persiapan baik dari segi kelembagaan, mitigasi bencana, piranti pendukung, maupun sumber daya manusia dari SATLAK PB Kabupaten Jombang sendiri yang dilakukan satu bulan sekali. Hanya saja rapat tersebut sering tidak dihadiri oleh anggota SATLAK PB dari berbagai instansi yang tergabung dengan alasan adanya pekerjaan yang belum diselesaikan di dalam instansinya. Hasil dari rapat tersebut akan diinformasikan Unit Operasi PB kecamatan sebagai pedoman antisipasi saat pra bencana
- b) Mengadakan sosialisasi penanganan bencana dan antisipasi menghadapi musim penghujan kepada Ketua Unit Operasi PB Kecamatan (kepada para camat) di ruang rapat sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang yang dilakukan dua bulan sekali dan disosialisasikan oleh SATLAK PB dengan tujuan unit operasi PB kecamatan dapat mengetahui penanganan bencana dan antisipasi menghadapi musim penghujan untuk diinformasikan ke desa/kelurahan.
- c) Mengadakan sosialisasi antisipasi dalam menghadapi cuaca oleh BMG Surabaya kepada unit Operasi PB kecamatan (para camat), Muspika (Kapolsek/Danramil) dan Kepala Satuan Linmas Desa (kades/lurah) daerah rawan bencana sekabupaten Jombang yang dilakukan selama dua bulan sekali.
- d) Dilakukan pelaksanaan posko piket bencana mulai dari tingkat kecamatan yaitu unit operasi PB kecamatan yang bertempat di setiap kantor kecamatan sampai di tingkat kabupaten yaitu SATLAK PB di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat selama 24 jam. Apabila terjadi bencana alam, masyarakat dapat melapor dari desa/kelurahan yang ditempati untuk diteruskan ke kecamatan dan ditindaklanjuti oleh SATLAK PB yang ada di tingkat kabupaten.

- e) Mengaktifkan komunikasi lewat handphone dan hp antara pihak operasi PB kecamatan dengan pihak SATLAK PB Kabupaten Jombang mengenai persiapan menghadapi bencana alam.

Sesuai dengan lima *point* koordinasi pada saat pra bencana, Sekretaris Ruang Pusat Pengendalian Operasi SATLAK PB Jombang yaitu Sudarjono menyatakan hal yang sama mengenai koordinasi saat pra bencana, beliau menyatakan:

“Sebagai bentuk persiapan menghadapi bencana, maka koordinasi yang dilakukan SATLAK PB Jombang saat pra bencana, diantaranya adalah mengadakan rapat persiapan bencana, sosialisasi penanganan bencana dan antisipasi menghadapi cuaca, pelaksanaan posko piket dan komunikasi yang paling penting.” (wawancara, 24 Februari 2009, di ruang kerjanya)

2. Aspek Mitigasi bencana alam SATLAK PB Kabupaten Jombang

2.1 Penilaian bahaya

Sumber bencana alam di Kabupaten Jombang menurut pantauan dari SATLAK PB Kabupaten Jombang adalah banjir dan tanah longsor. Hal ini di akibatkan karena Kabupaten Jombang mempunyai beberapa daerah yang topografinya pegunungan dan juga dialiri beberapa aliran sungai yang cukup besar.

Pernyataan di atas juga sejalan dengan pernyataan Drs.Widjono Suparno sebagai ketua pelaksana harian SATLAK PB Jombang yang berpendapat bahwa:

“Berdasarkan data kejadian bencana alam sebelumnya dan mempunyai topografi pegunungan yang dialiri banyak sungai yang cukup besar, Kabupaten Jombang merupakan daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor. Untuk itu diperlukan persiapan yang baik dari SATLAK PB Jombang untuk menanggulangi bencana alam banjir dan tanah longsor tersebut.” (wawancara, 25 Februari 2009, di ruang kerjanya).

Disamping itu fenomena la-nina menyebabkan longsor sebagian wilayah Indonesia mengalami curah hujan tinggi (diatas normal) termasuk wilayah Kabupaten Jombang. Kemudian penebangan hutan secara liar oleh manusia dan pendangkalan beberapa aliran sungai di kabupaten Jombang karena pengerukan tanah membuat bencana alam banjir dan tanah longsor semakin sering terjadi.

Tabel 3
Data Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Jombang dalam angka tahun
2007, 2008 dan sampai dengan februari 2009

| No. | Kecamatan | Jenis/Macam Bencana Alam | | | | |
|---------------|------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| | | Banjir | Tanah Longsor | Genangan air | Putting beliung | Banjir dan tanah longsor |
| 1. | Jombang | - | - | 5x | - | - |
| 2. | Diwek | - | - | - | - | - |
| 3. | Gudo | 4 x | - | - | - | - |
| 4. | Perak | - | - | 2x | 4x | - |
| 5. | Bandar KM | 8x | 7x | - | 1x | - |
| 6. | Tembelang | - | - | 4x | - | - |
| 7. | Megaluh | - | - | - | - | - |
| 8. | Ploso | 8x | 9x | - | - | - |
| 9. | Plandaan | 9x | 8x | - | - | - |
| 10. | Kabuh | 7x | 9x | - | - | - |
| 11. | Kudu | 7x | 7x | 4x | - | - |
| 12. | Ngusikan | - | - | 4x | - | - |
| 13. | Mojoagung | 12x | 8x | 6x | - | - |
| 14. | Sumobito | 2x | 1x | - | - | - |
| 15. | Kesamben | 3x | 1x | - | - | - |
| 16. | Peterongan | 1x | - | 8x | - | - |
| 17. | Jogoroto | - | - | 5x | - | - |
| 18. | Ngoro | - | - | 6x | 6x | - |
| 19. | Bareng | 10x | 9x | - | - | - |
| 20. | Mojowarno | 11x | 10x | - | - | - |
| 21. | Wonosalam | 8x | 12x | - | - | 4x |
| Jumlah | | 90x | 81x | 44x | 11x | 4x |

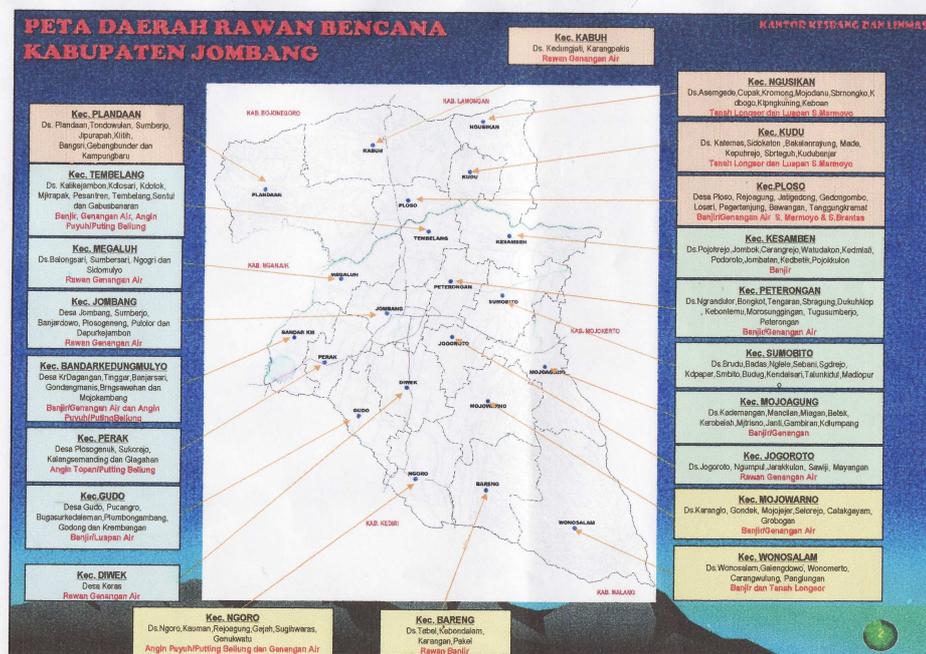
Keterangan: x berarti frekuensi terjadinya bencana alam, Sumber data: SATLAK PB Kabupaten Jombang tahun 2007, 2008 dan sampai dengan februari 2009.

Dari data tersebut dapat diinformasikan bahwa bencana alam banjir dan tanah longsor merupakan sumber bencana alam yang terjadi di Kabupaten Jombang, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat probabilitas kejadian bencana alam yang terjadi. Dalam kurun waktu dua setengah tahun, banjir dan tanah longsor melanda sebagian besar kecamatan di Kabupaten Jombang. Dari tabel tersebut dapat diketahui juga bahwa tujuh kecamatan di Kabupaten Jombang berpotensi banjir dan tanah longsor diakibatkan sering terjadinya bencana alam tersebut. Tujuh kecamatan tersebut diantaranya Kabuh, Kudu, Ploso, Bareng, Mojoagung, Wonosalam, dan Mojowarno.

Kemudian dari karakteristik wilayah Kabupaten Jombang dan data kejadian bencana alam pada tahun 2007, 2008, dan sampai dengan februari 2009, maka dapat dihasilkan peta daerah rawan bencana alam yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya, yaitu peringatan dan persiapan. Berikut ini adalah peta daerah rawan bencana alam Kabupaten Jombang:

Gambar 4

Peta Daerah Rawan Bencana Alam Kabupaten Jombang



Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Jombang

Sumber: Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Jombang

2.2 Peringatan

Sistem peringatan yang dipakai oleh SATLAK PB Kabupaten Jombang adalah data bencana alam yang telah terjadi serta berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Data bencana alam dapat dimanfaatkan untuk mengetahui daerah-daerah rawan bencana alam. Pihak SATLAK PB Kabupaten Jombang membuat peta daerah rawan bencana untuk segera diinformasikan kepada unit operasi PB yang ada di tiap kecamatan Kabupaten Jombang. Dari unit operasi PB nantinya akan disosialisasikan di kantor kecamatan kepada linmas desa/kelurahan dan kepada masyarakat kecamatan tersebut, sehingga masyarakat mengetahui daerah mana saja yang dijadikan kawasan rawan bencana di Kabupaten Jombang.

Kemudian, sistem peringatan yang kedua adalah alat komunikasi. Pihak SATLAK PB Kabupaten Jombang mengandalkan komunikasi dua arah, berupa telepon dan *handphone*. Mereka berpendapat bahwa komunikasi merupakan salah satu hal yang paling penting agar penanganan bencana dapat direspon dan ditanggapi secara cepat. Maka dari itu, masing-masing anggota SATLAK PB di tingkat kabupaten, unit operasi di tingkat kecamatan serta linmas yang ada di desa/kelurahan dibekali *handphone* dengan tujuan apabila ada tanda-tanda bencana alam akan terjadi, anggota tersebut mampu berkomunikasi secara cepat sehingga dampak yang ditimbulkan nantinya dapat diminimalisir dengan baik. Selain alat komunikasi dua arah tersebut, linmas yang ada di tingkat desa/kelurahan sebagai pihak yang pertama kali mengetahui apakah akan terjadi bencana atau tidak, memfungsikan pos kamling sebagai posko bencana alam dan dijaga serta berkeliling di daerah desa/kelurahan tersebut selama 24 jam. Apabila akan terjadi bencana, linmas menggunakan kentongan sebagai bentuk peringatan untuk memberitahukan kepada warga setempat agar segera mempersiapkan diri menghadapi bencana alam yang akan terjadi.

System peringatan yang terpenting berupa komunikasi juga dinyatakan oleh Unggul YS, Chaerul Anwar, dan Ngaseri yang menjabat sebagai ketua pelaksana harian di Uni Operasi PB di tingkat kecamatan Bareng, Mojoagung, dan Wonosalam. Mereka berpendapat bahwa:

“Hal yang terpenting dalam sebuah system peringatan pada saat pra bencana adalah adanya komunikasi rutin antara anggota Unit Operasi PB

di tingkat kecamatan dengan pihak SATLAK PB yang ada di tingkat kabupaten. Dikarenakan komunikasi dengan menggunakan telephone dan seluler sangat cepat dan murah sehingga hal-hal yang menyangkut tentang persiapan menghadapi bencana alam dapat segera diketahui.” (wawancara, 19 Februari, di ruang kerja masing-masing)

2.3 Persiapan

Langkah-langkah yang dilakukan oleh SATLAK PB Kabupaten Jombang dalam hal persiapan untuk mengurangi dampak akibat bencana, diantaranya adalah:

- a) Di tingkat kabupaten, pihak SATLAK PB mengaktifkan posko bencana alam dengan penjagaan selama 24 jam, sehingga apabila ada pelaporan tentang kejadian bencana, maka dapat segera ditindaklanjuti. Kemudian merencanakan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya, serta membangun struktur fasilitas yang baik, misalnya membuat pelindung badan sungai.
- b) Di tingkat kecamatan, pihak unit operasi PB juga mengaktifkan posko bencana alam dengan penjagaan selama 24 jam. Selain itu, juga dibentuk forum antara masyarakat dengan unit operasi PB tentang penanggulangan bencana. Hal lainnya yang dilakukan adalah mengadakan kerja bakti dua minggu sekali dengan membersihkan lingkungan sekitar.
- c) Di tingkat desa/kecamatan, kepala desa/lurah mengadakan musyawarah bersama masyarakat tentang penanggulangan bencana tiap satu bulan sekali, mengaktifkan posko bencana alam, serta berkerja bakti membersihkan lingkungan sekitar.

3. Aspek Piranti pendukung SATLAK PB Kabupaten Jombang.

3.1 Macam-macam piranti pendukung

Perlengkapan dan peralatan yang ada dan siap dipergunakan/dioperasikan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan di tingkat SATLAK PB adalah sebagai berikut:

1. Alat Komunikasi yang meliputi:

| Jenis Alat Komunikasi | Jumlah Barang |
|--|---|
| a.) Telepon  | 2 buah, dengan nomor telp. (0321) 863448 dan (0321) 7250990. Ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB |
| b.) Faximile  | 1 buah dan ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB |
| c.) Pesawat Komunikasi Rig  | 1 buah dan ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB |
| d.) Handy Talky  | 27 pasang (21 pasang di kecamatan dan 6 pasang di Sekretariat SATLAK PB) |
| e.) Kamera Digital  | 1 buah dan ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang |

2. Alat-alat Berat yang meliputi

| Jenis Alat Berat | Jumlah Barang |
|---|---|
| a.) Back Hoe  | 2 buah dan ditempatkan di Dinas Pengairan Kabupaten Jombang |

| Jenis Alat Berat | Jumlah Barang |
|---|--|
| b.) Exavator  | 2 buah dan ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum Prasarana Jalan Kabupaten Jombang |
| c.) Whell Loader  | 3 buah dan ditempatkan di Dinas Pemukiman dan Pengembangan Prasarana |

3. Sarana Mobilitas

| Jenis Sarana Mobilitas | Jumlah Barang |
|---|--|
| a.) Truk  | 5 buah dan ditempatkan di Dinas Perhubungan sebanyak 3 buah dan di Dinas 2 buah di Dinas Pengairan |
| b.) Dump Truk  | 1 buah di Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang |
| c.) Mobil PMK  | 2 buah dan ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang |
| d.) Mobil roda 4 (empat)  | 3 buah dan ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang |

| Jenis Sarana Mobilitas | Jumlah Barang |
|---|--|
| <p>e.) Kendaraan roda 2 (dua)</p>  | <p>2 buah dan ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang</p> |

4. Perlengkapan Penunjang

| Jenis Perlengkapan Penunjang | Jumlah Barang |
|---|--|
| <p>a.) Tenda (kapasitas regu)</p>  | <p>7 buah dan ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang</p> |
| <p>b.) Alat-alat dapur umum</p>  | <p>3 set dan ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang</p> |
| <p>c.) Perahu karet</p>  | <p>1 buah dan ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang</p> |

| Jenis Perlengkapan Penunjang | Jumlah Barang |
|---|---|
| d.) Perahu kayu  | 2 buah dan ditempatkan di sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang |
| e.) Pompa mobil  | 1 buah dan ditempatkan di sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang |
| f.) Diesel/Jenset  | 1 buah dan ditempatkan di sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang |
| g.) Gergaji Mesin (Senso)  | 3 buah dan ditempatkan di sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang |
| h.) Terpal Plastik  | 5 buah dan ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang |
| i.) Karung glangsing  | Menyesuaikan kebutuhan dan ditempatkan di masing-masing kantor kecamatan di Kabupaten Jombang |
| j.) Lampu senter  | 3 buah dan ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang |

| Jenis Perlengkapan Penunjang | Jumlah Barang |
|---|---|
| k.) Jas hujan  | 4 buah dan ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang |
| l.) Sepatu karet  | 4 buah dan ditempatkan di Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang |

3.2 Fungsi piranti pendukung SATLAK PB Jombang

Semua piranti pendukung yang dimiliki oleh SATLAK PB Kabupaten Jombang cukup siap digunakan pada sebelum, saat dan setelah bencana terjadi. Dengan adanya bencana yang terjadi di Kabupaten Jombang, piranti pendukung ini dapat mencukupi kebutuhan akan penanganan bencana. Jika piranti pendukung tersebut dibutuhkan saat penanganan bencana, maka anggota SATLAK PB Kabupaten Jombang yang bertugas menjaga sekretariat SATLAK PB segera menghubungi instansi pemerintahan, terkait dengan penempatan dan penanggung jawab piranti pendukung untuk memberikan bantuan kepada daerah/kecamatan yang terkena bencana sehingga piranti tersebut mampu meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Kemudian fungsi dari piranti pendukung yang digunakan SATLAK PB Jombang dalam menangani bencana adalah:

1. Alat Komunikasi

a.) Telepon Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ)

Telepon adalah alat telekomunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. Telepon SLJJ yang berada di sekretariat SATLAK PB ini, digunakan sebagai alat komunikasi untuk menerima dan mengirim laporan apabila ada terjadi bencana di kecamatan maupun daerah lainnya dan dapat digunakan sewaktu-waktu di dalam menangani bencana.

b.) *faximile*

Faximile adalah alat yang mampu mengirimkan dokumen melalui jaringan telepon dengan hasil yang sama persis dengan aslinya. *Faximile* ini berada di sekretariat SATLAK PB bertempat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang. *Faximile* tersebut berfungsi mengirim dan menerima dokumen yang berhubungan dengan penanganan bencana.

c.) Pesawat Komunikasi Rig

Pesawat Komunikasi Rig adalah alat komunikasi yang dapat dihubungkan melalui radio. Alat komunikasi ini, berfungsi sebagai alat komunikasi diantara anggota SATLAK PB Kabupaten Jombang saat berada di sekretariat.

d.) *Handy Talky*

Handy Talky adalah alat komunikasi dua arah dengan frekuensi radio yang mempunyai jarak jangkauan cukup jauh. Alat ini berfungsi sebagai alat komunikasi bagi anggota internal SATLAK PB di tingkat kabupaten maupun Unit operasi PB di tingkat kecamatan.

e.) Kamera Digital

Kamera digital adalah alat untuk membuat gambar dari obyek untuk selanjutnya dibiaskan melalui lensa kepada sensor CCD (ada juga yang menggunakan sensor CMOS) yang hasilnya kemudian direkam dalam format digital ke dalam media simpan digital. Alat ini berfungsi sebagai alat dokumentasi pada saat penanganan bencana yang meliputi pra, saat dan setelah bencana terjadi.

2. Alat-alat berat

a.) *Back hoe*

Back hoe adalah suatu sarana (angkutan) seperti traktor dengan suatu lengan tangan dan ember menjulang pada atas punggung dan suatu pemuat medan menjulang pada medan itu. Fungsi dari alat ini adalah sebagai penggali, pengangkut tanah, sampah pada saat dan setelah bencana alam terjadi.

b.) *Exavator*

Exavator adalah peralatan serba guna, dapat digunakan untuk pemindah, memuat dan menggali serta memotong tanah. Fungsi dari alat ini tidak jauh berbeda dengan *back hoe* yaitu sebagai pemuat dan penggali tanah yang berserakan pada saat dan setelah terjadinya bencana alam terjadi. Selain itu digunakan untuk memuat batuan ke dalam *dump truck* dari lokasi bencana alam, Memuat drainase pada kiri kanan jalan, membongkar gundukan tanah bukit yang akan dibuat jalan, dan membantu memuat tanah ke dalam mobil.

c.) *Wheel Loader*

alat berat yang digunakan untuk memuat bahan-bahan material seperti agregat tanah timbunan ke dalam *dump truck* yang akan membawa tanah tersebut dari lokasi penggalian kepada lokasi timbunan.

3. Sarana Mobilitas

a.) Truk

Truk adalah sebuah kendaraan bermotor untuk mengangkut barang. Truk bagi SATLAK PB sendiri berfungsi sebagai alat pengangkut barang-barang, misalnya: bantuan logistik, longsor tanah, maupun pohon-pohon yang tumbang akibat bencana alam.

b.) Dump Truk

Penggunaan Dump Truk pada penanggulangan bencana alam ini ditujukan untuk mengangkut material-material dari *quarry* (tempat pengambilan batu/material) ke tempat dimana lokasi bencana alam terjadi. Kadang-kadang juga digunakan untuk mengangkut bahan/peralatan lain yang bersifat menunjang pelaksanaan pekerjaan. Keistimewaan dari Dump Truk adalah dimana muatan yang terdapat didalamnya ditumpahkan sendiri tanpa bantuan peralatan lainnya.

c.) Mobil Pemadam Kebakaran (PMK)

Mobil PMK adalah mobil yang digunakan apabila ada bencana kebakaran baik yang ditimbulkan manusia maupun alam. Mobil ini berisi air untuk memadamkan api.

d.) Mobil

Mobil adalah kendaraan beroda empat atau lebih yang membawa mesin sendiri. Mobil digunakan sebagai sarana mobilitas bagi anggota SATLAK PB Kabupaten Jombang untuk menangani dan menanggulangi bencana.

e.) Kendaraan roda dua (motor)

Motor adalah sebuah kendaraan beroda dua bermesin. Fungsi dari alat ini tidak jauh berbeda dengan mobil, yaitu sebagai sarana mobilitas bagi anggota SATLAK PB Kabupaten Jombang untuk menangani dan menanggulangi bencana.

4. Perlengkapan Penunjang

a.) Tenda (kapasitas regu)

Tenda dalam penanggulangan bencana alam ini digunakan sebagai tempat berlindung bagi para korban bencana alam yang berada di daerah pengungsian.

b.) Alat-alat dapur umum

Alat dapur umum digunakan sebagai alat untuk memasak makanan dan minuman di tempat pengungsian bagi korban bencana alam.

c.) Perahu Karet

Perahu karet adalah perahu yang terbuat dari bahan karet yang bisa dikempiskan kalau sedang tidak digunakan dan dikembangkan lagi pada saat akan digunakan. Kegunaan dari alat ini diantaranya adalah sebagai sekoci pada kapal kecil dan keperluan pertolongan pada banjir, seperti yang digunakan di berbagai tempat di Kabupaten pada saat banjir

d.) Perahu Kayu

Perahu kayu adalah kendaraan air, biasanya lebih kecil dari kapal laut yang terbuat dari kayu. Alat ini berfungsi sebagai sarana mobilitas untuk para pengungsi pada saat terjadinya banjir.

e.) Pompa Mobil

Pompa mobil disini digunakan sebagai alat untuk memompa angin untuk kendaraan sebagai sarana mobilitas bagi anggota SATLAK PB Kabupaten Jombang.

f.) Diesel/Jenset

Diesel/jenset adalah mesin pembakaran solar. Digunakan sebagai sarana pembangkit listrik di daerah pengungsian para korban bencana alam.

g.) Gergaji Mesin (Senso)

Gergaji mesin (Senso) ialah alat yang digunakan untuk memotong/menggergaji pohon. Alat ini berfungsi untuk memotong pohon yang tumbang pada saat terjadinya bencana alam.

h.) Terpal Plastik

Terpal plastik adalah alat pelindung yang terbuat dari plastik. Digunakan sebagai tempat berteduh bagi para pengungsi akibat bencana yang terjadi.

i.) Karung Glangsing

Karung glangsing adalah karung besar yang nantinya diisi tanah dan digunakan sebagai penahan banjir. Biasanya ditaruh di sisi sungai, tanggul, bendungan maupaun rumah-rumah warga saat banjir terjadi.

j.) Lampu Senter

Lampu senter disini, berfungsi sebagai alat penerangan untuk mencari korban bencana alam baik dari segi material maupun immaterial pada malam hari.

k.) Jas Hujan

Alat pelindung badan yang terbuat dari bahan plastic yang berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat).

l.) Sepatu Karet

Sepatu karet adalah alat pelindung kaki yang terbuat dari bahan karet. Berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan di lapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.

4. Aspek Sumber Daya Manusia yang terlatih SATLAK PB Kabupaten Jombang

4.1 Kualifikasi sumber daya manusia

Kualifikasi sumber daya manusia yang ada di dalam kelembagaan SATLAK PB Kabupaten Jombang langsung ditunjuk oleh Ketua SATLAK PB sendiri. Kualifikasi anggota SATLAK PB Kabupaten Jombang didasarkan pada latar belakang dimana anggota tersebut bekerja sebelumnya, misal dari dinas, badan, kantor maupun institusi lain. Dapat diambil contoh, dibentuknya SATGAS kesehatan oleh SATLAK PB Kabupaten Jombang sesuai dengan kualifikasi yaitu direkrutnya anggota SATGAS tersebut dari instansi yang terkait dengan kesehatan, yaitu dinas kesehatan, PMI cabang Jombang, RSUD Swadana Jombang, RSI Jombang, RSK Kecamatan Mojowarno, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Jombang.

Kualifikasi sumber daya manusia yang ada di dalam unit operasi PB di tingkat kecamatan juga tidak berbeda dengan SATLAK PB di tingkat kabupaten. Kualifikasi anggota Unit Operasi PB kecamatan, ditunjuk oleh camat sebagai ketua unit tersebut. Sebagai contoh, dibentuknya unit keamanan didasarkan pada pegawai yang bekerja pada institusi/lembaga yang menangani keamanan di tingkat kecamatan, yaitu Polsek, Koramil, kepala seksi keamanan dan ketertiban serta pramuka.

4.2 Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia oleh SATLAK PB Kabupaten Jombang kepada anggotanya pada saat para bencana meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya undangan sosialisasi tentang penanganan bencana alam dari SATLAK PB kabupaten Jombang kepada unit operasi PB di tingkat kecamatan serta linmas yang terdapat di desa/kelurahan. Masing-masing diwajibkan mengirim dua orang dari kecamatan dan desa/kelurahan. Acara tersebut diadakan di sekretariat SATLAK PB yang bertempat di kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kabupaten jombang. Acara tersebut dilaksanakan satu bulan sekali dan berisi pengetahuan mengenai bencana alam serta

penanganannya pada tiap tahap manajemen bencana, sehingga unit operasi PB dan linmas mampu menangani bencana alam di daerahnya secara cepat.

- b) Adanya pelatihan antisipasi/pencegahan bencana alam di tingkat kecamatan. Pelatihan tersebut ditujukan pada unit operasi PB dan linmas oleh SATLAK PB Kabupaten Jombang. Pelatihan tersebut juga diadakan tiga bulan sekali dan bertempat di setiap kantor kecamatan di Kabupaten Jombang dengan tujuan memberikan bekal atau pelatihan kepada unit operasi PB dan linmas setempat dalam rangka menangani bencana alam nantinya.
- c) Adanya simulasi penanggulangan bencana alam oleh SATLAK PB kepada anggotanya sendiri dan masyarakat Kabupaten Jombang. Simulasi ini dilaksanakan tiga bulan sekali dan dilaksanakan bergiliran sesuai dengan karakteristik bencana alam di daerah yang dijadikan kawasan rawan bencana di Kabupaten Jombang. Simulasi ini dihadiri oleh SATKORLAK provinsi, SATLAK PB Kabupaten jombang, unit operasi PB tingkat kecamatan, linmas di desa/kelurahan serta warga setempat dengan tujuan melatih masyarakat di wilayah yang dijadikan kawasan rawan bencana alam guna meningkatkan kepekaan dan kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana alam sesuai karakteristik daerah tersebut, yang kejadiannya tidak dapat diduga dan dampaknya tidak dapat diperhitungkan. Kemudian dapat memelihara, memacu dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan keterpaduan antar unsur potensi yang berada dalam masyarakat dengan aparat serta instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana alam.

C. Pembahasan Dengan Metode Analisis Framing

1. Aspek kelembagaan SATLAK PB Kabupaten Jombang

1.1 Awal Pembentukan Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Soedirman, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial pada Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia mengenai kelembagaan penanganan bencana yang ideal, kelembagaan SATLAK PB Kabupaten Jombang cukup siap untuk berkoordinasi dengan baik saat pra bencana. Kelembagaan penanganan yang ideal tersebut meliputi: *pertama*, dalam penanggulangan bencana, tentunya kita harus tahu tentang tempat terjadinya bencana itu dimana. Untuk itu agar terkoordinasi dengan baik, SATLAK PB Kabupaten Jombang telah membentuk Unit Operasi PB di tingkat kecamatan dan Satuan hansip/linmas di tingkat desa/kelurahan untuk mengetahui lebih cepat dimana terjadinya suatu bencana alam. SATLAK PB Kabupaten Jombang juga telah menganalisis karakteristik wilayah Kabupaten Jombang sehingga dapat disimpulkan jenis bencana alam apa yang akan terjadi kemudian membuat peta rawan bencana alam, supaya masyarakat mengetahui tentang daerah-daerah mana saja yang dijadikan kawasan rawan bencana. Sehingga nantinya, masyarakat mampu melakukan persiapan saat pra bencana alam.

Kedua, Sejauh mana daerah tersebut mempunyai kelembagaan yang siap untuk menanggulangi bencana tersebut secara cepat dan tepat. Di dalam kelembagaan SATLAK PB Kabupaten Jombang sendiri, dari segi organisasinya masih kurang siap dikarenakan koordinasi dari berbagai instansi/lembaga yang tergabung di dalamnya hanya ada disaat musim penghujan tiba, dan tidak dilakukan secara berkelanjutan, selain itu beragamnya instansi/lembaga didalamnya membuat persiapan dalam menghadapi bencana alam semakin buruk, dikarenakan ketidakjelasan garis komando antar lembaga/institusi serta prosedur yang berbelit-belit membuat upaya penanggulangan tidak terkoordinasikan dengan baik, karena masalah bencana ini tidak pernah ditangani secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah tidak adanya kebijakan pemerintah yang integral, sehingga bencana ditangani secara parsial, bahkan antar-instansi/lembaga seringkali tidak terjalin koordinasi.

Ketiga, perlu dikaji ulang dalam rangka pembaharuan upaya penanggulangan bencana alam yang lebih baik dalam menangani bencana di daerah atau yang bersifat bencana nasional. Dalam hal ini, SATLAK PB Kabupaten Jombang dari segi dasar hukum pembentukan SATLAK masih mengacu pada Keputusan Presiden No.3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana, padahal dasar hukum tersebut sudah diperbaharui dengan undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana alam masih mengacu pada keputusan presiden dan peraturan pemerintah tersebut. Meskipun mengacu pada peraturan yang lama, SATLAK PB Kabupaten Jombang juga tidak sepenuhnya melakukan semua instruksi yang sesuai dalam peraturan tersebut, misalnya tidak adanya *early warning system* yang dipasang dan dipakai di daerah yang terkena rawan bencana alam. Ketua Pelaksana harian SATLAK PB Kabupaten Jombang menginformasikan mengapa tidak ada *early warning system* karena tidak adanya biaya, tentu hal tersebut sangat ironis. *Keempat*, pelibatan peran serta masyarakat adalah hal yang sangat mutlak. Pada umumnya masyarakat Kabupaten Jombang memiliki spontanitas yang tinggi dan memiliki sifat yang terbuka, mudah menerima informasi-informasi yang baru dan cepat tanggap terhadap segala permasalahan yang ada sehingga terjadi komunikasi yang positif, termasuk dalam penanggulangan bencana alam pada saat pra bencana, masyarakat Kabupaten Jombang bersama dengan SATLAK PB Kabupaten Jombang telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program atau tindakan riil dari pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat preventif kebencanaan, misalnya pengadaan kerja bakti di tiap desa/kelurahan
- b. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana.
- c. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha preventif

- d. kebencanaan seperti kebijakan tataguna tanah agar tidak membangun di lokasi yang rawan bencana.

Kemudian dari segi keuangan dalam sebuah kelembagaan, SATLAK PB Jombang masih mengandalkan bantuan dana cadangan daerah dan batuan dari masyarakat untuk pembiayaan penanganan bencana, misal: dana tersebut digunakan sebagai penanganan pengungsi dan rehabilitasi. Harusnya pihak dari SATLAK PB mempunyai post pembiayaan bencana dalam APBD, sehingga tidak lagi bersifat cadangan.

1.2 Tugas dan fungsi instansi terkait yang tergabung dalam kelembagaan

Berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Jombang, tugas dan fungsi instansi terkait dalam organisasi non struktural yaitu SATLAK PB Kabupaten Jombang dituangkan. Sejauh ini tugas dan fungsi SATLAK Kabupaten Jombang menurut peneliti sudah cukup baik. Masalahnya apakah tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab oleh SATLAK PB Kabupaten Jombang, dan tidak dijadikan bacaan formal saja. Dengan beragamnya institusi yang ada, dan tidak adanya koordinasi secara berkelanjutan, dirasakan peneliti, anggota SATLAK PB tidak akan mengerti tentang tugas dan fungsi masing-masing. Kemudian berdasar tugas dan fungsinya, institusi ini nampak lebih membobotkan diri kepada tahap tanggap darurat pada saat terjadi bencana saja, sedangkan tahap berikut semisal tahap pasca darurat, tahap pencegahan dan mitigasi, dan tahap kesiapsiagaan kurang atau bahkan tidak mendapat perhatian sama sekali. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang tugas dan fungsi dari masing-masing individu, sehingga dalam manajemen bencana yang dilakukan, mereka akan mengetahui apa yang harus mereka lakukan tanpa menunggu perintah dari Ketua SATLAK PB Kabupaten Jombang.

1.3 Koordinasi instansi yang tergabung dalam kelembagaan

SATLAK PB Kabupaten Jombang pada dasarnya adalah wadah koordinasi yang bersifat non-struktural yang terdiri dari banyaknya instansi/lembaga yang tergabung didalamnya, yang sebgaiian besar susunan anggotanya terdiri dari para pejabat tinggi, yang nota bene dalam kesehariannya telah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Karena itu kondisi struktur

organisasi SATLAK PB Kabupaten Jombang kurang memungkinkan berlangsungnya tindakan cepat dan tepat, dan bahkan ada kesan saling menunggu, saling mengandalkan dan kurang terkoordinir. Koordinasi yang dilakukan tidak secara rutin dan pada setiap pertemuan/rapat yang diadakan hampir sebagian tidak menghadiri karena kesibukan masing-masing. Untuk itu diperlukan monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang kepada SATLAK PB Kabupaten Jombang, agar pada proses koordinasi yang berlangsung dapat berjalan secara efektif, disamping itu diperlukan kesadaran dari dalam diri anggota SATLAK PB Kabupaten Jombang

2. Aspek Mitigasi bencana alam SATLAK PB Kabupaten Jombang

2.1 Penilaian bahaya

Menurut Sphere, penilaian bahaya ini diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu sehingga nantinya dapat menghasilkan peta potensi bencana yang menunjukkan daerah mana saja yang nantinya akan dijadikan kawasan rawan bencana. Tahapan-tahapan tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak SATLAK PB Kabupaten Jombang, tetapi pada proses dari tiap tahapan tersebut masih kurang sehingga diperlukan pembaharuan secara terus-menerus. Peneliti melihat bahwa pada peta potensi bencana hanya dijadikan wacana belaka, dan tidak diinformasikan secara jelas kepada masyarakat, untuk itu diperlukan kajian ulang tentang peta potensi bencana yang dibuat. Harusnya pembentukan peta potensi bencana selain dari tahapan-tahapan tersebut juga didukung dengan piranti dan kapasitas sumber daya manusia yang handal, sehingga hasil dari peta potensi bencana tadi sesuai

2.2 Peringatan (*warning*)

Sistem peringatan merupakan salah satu hal yang tidak boleh dikesampingkan, karena dengan sistem tersebut, masyarakat dapat dengan cepat menginformasikan kepada pihak SATLAK PB bahwa di tempat mereka telah terjadi bencana alam. Sarana komunikasi dan sarana peringatan pendukung lainnya, misal: alat pendeteksi banjir. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya. Pernyataan

peneliti tersebut sejalan dengan Sphere yang menyatakan bahwa sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat.

Persiapan SATLAK PB Kabupaten Jombang sendiri dalam hal peringatan sudah cukup baik, karena pemikiran SATLAK PB Kabupaten Jombang sendiri adalah bahwa komunikasi sangat berperan penting dalam menanggulangi bencana alam. SATLAK PB Kabupaten Jombang sengaja memfasilitasi anggota mereka baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten dengan telepon selular (*handphone*), hal ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara tepat dan cepat, sehingga respon dari SATLAK Kabupaten Jombang dapat segera ditindaklanjuti. Dapat diambil contoh, di saat meluapnya sungai akibat hujan deras, selayaknya juga dilakukan tak hanya dengan upaya persuasif. Tindakan memaksa selayaknya juga diterapkan, tentu ada sosialisasi tindakan ini harus diambil, jauh sebelum bencana ini terdeteksi. Teriakan melalui pengeras suara masjid ataupun kentongan hingga menggunakan teknologi SMS (*Short Message Service*) ke setiap pemilik telepon selular di daerah tersebut bisa menjadi alternatif peringatan bagi warga masyarakat. Sayangnya, sarana peringatan pendukung seperti alat pendeteksi banjir belum tersedia. Padahal, tujuh kecamatan di Kabupaten Jombang berpotensi bencana alam banjir. Peramalan cuaca dari anggota SATLAK PB Kabupaten Jombang yang hanya mengandalkan pengalaman bencana alam tahun-tahun sebelumnya, telah menggeser sarana peringatan pendukung untuk segera dapat direalisasikan. Kemampuan ramal-meramal masyarakat dalam memperkirakan datangnya bencana ini memang harus dikaji dan disandingkan dengan hasil prakiraan institusi resmi semacam Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG). Di satu pihak keakuratan menjadi lebih teruji, di lain pihak masyarakat akan menjadi lebih cerdas. Beberapa unsur yang perlu dikaji dari kelompok masyarakat dalam hal ramal-meramal memperkirakan datangnya bencana, antara lain adalah:

- a) kearifan lokal yang digunakan untuk meramal
- b) indikator deteksi atau peringatan dini yang digunakan
- c) Kepercayaan masyarakat atas ramalan

- d) Keakuratan ramalan.
- e) Sarana lain yang digunakan (misal bioindikator)

Hal tersebut nantinya akan berdampak pada resiko yang akan ditimbulkan oleh bencana alam banjir dan tanah longsor yang merupakan sumber bencana di Kabupaten Jombang. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi tempat dimana alat pendeteksi banjir itu akan dipasang, kemudian menyiapkan dana untuk menganggarkan alat pendeteksi banjir. Pengetahuan dari anggota SATLAK PB Kabupaten Jombang tentang alat pendeteksi banjir juga sangat penting, untuk itu diperlukan pelatihan tentang penggunaan alat tersebut.

2.3 Persiapan

Pada intinya, persiapan pada mitigasi yang dilakukan oleh SATLAK PB Kabupaten Jombang berupa pengaktifan posko dan kegiatan kerja bakti lingkungan sekitar dengan melibatkan masyarakat. Persiapan yang dilakukan SATLAK Kabupaten Jombang terbilang cukup sederhana. Dengan persiapan berbasis masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Ir. Agus Rahmat yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi bencana dengan melibatkan masyarakat. Sebenarnya ciri dari masyarakat Kabupaten Jombang dalam menanggulangi bencana alam sangat respon dan siap bekerjasama dengan pihak SATLAK PB Kabupaten Jombang, jadi pihak SATLAK PB sendiri tidak merasa kesulitan dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi bencana yang akan terjadi. Untuk itu dalam pelaksanaan persiapan tersebut, hendaknya perlu dikaji secara terus-menerus sehingga akan timbul pembaharuan dalam persiapan mitigasi tersebut. Kemudian, kekurangan dari SATLAK PB Kabupaten Jombang dalam persiapan ini adalah belum dilaksanakannya perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya. Untuk itu harusnya segera direncanakan dengan melibatkan masyarakat yang terkena bencana alam. Dengan aspirasi/pendapat dari masyarakat akan diketahui perencanaan tata ruang yang aman dan nyaman sehingga tujuan utama mitigasi yaitu meminimalkan dampak bencana dapat diwujudkan.

3. Aspek piranti pendukung SATLAK PB Kabupaten Jombang.

3.1 Macam-macam piranti pendukung

Menurut data yang sudah terkumpul, upaya yang dilakukan SATLAK PB Kabupaten Jombang dalam mempersiapkan peralatan pendukung saat pra bencana sudah cukup baik. Mereka membedakan peralatan pendukung tersebut ke dalam empat bagian, yaitu lima buah alat komunikasi, tiga buah alat-alat berat, lima buah sarana mobilitas, dan 12 buah perlengkapan penunjang. Hanya saja sarana tersebut belum sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana. Adapun sarana yang sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah:

- a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
- b. posko Bencana beserta perlengkapan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;
- c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
- d. peta rawan bencana;
- e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
- f. prosedur tetap (Protap) penanggulangan bencana;
- g. dapur umum berikut kelengkapan logistiknya;
- h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
- i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
- j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
- k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, Pemerintah dari Swasta); dan
- l. lokasi sementara bagi pengungsi.

Menurut data sarana yang penulis ambil dalam prosedur tetap (protap) penanggulangan bencana Kabupaten Jombang, tidak adanya peralatan peringatan

dini (*early warning system*), rute dan lokasi evakuasi pengungsi, sarana air bersih dan sarana sanitasi. Hal ini tentu saja akan memperlambat kerja tim SATLAK PB Kabupaten Jombang pada tahap pasca bencana alam nantinya serta kurang membantu SATLAK PB itu sendiri dalam meminimalkan dampak resiko dari bencana itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Sphere dalam Pujiono bahwa pada saat pra bencana, piranti pendukung untuk menanggulangi bencana sangat diperlukan baik secara administratif maupun teknis dan akan membantu meminimalkan dampak resiko dari bencana itu sendiri.

3.2 Fungsi piranti pendukung

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana, fungsi dari piranti pendukung dalam penanganan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, dan menanggulangi bencana. Sesuai dengan Sphere dalam Pujiono fungsi piranti pendukung tersebut haruslah benar-benar difungsikan sesuai dengan fungsinya. Hanya saja dalam prakteknya, Salah satu piranti pendukung milik SATLAK PB Kabupaten Jombang, yaitu karung plastik berisi tanah sebagai penahan banjir dan genangan air yang diletakkan di tiap kecamatan tidak difungsikan secara maksimal. Karung plastik berisi tanah tersebut dibiarkan tertumpuk di beberapa kantor kecamatan, dan tidak dipergunakan semestinya. Permasalahan lain adalah secara terpusat semua piranti pendukung penanganan bencana alam tersebut diletakkan di Sekretariat SATLAK PB Kabupaten Jombang. Seharusnya hal tersebut bisa diantisipasi dengan penyeleksian piranti pendukung tersebut, jenis piranti apa saja yang dapat langsung di sediakan di tiap kantor kecamatan, misalnya perlengkapan penunjang berupa tenda, alat dapur, karung glangsing (plastik), dan sebagainya supaya pada saat bencana terjadi, Unit Operasi PB di tingkat kecamatan segera dengan cepat dan tanggap sehingga dapat meminimalisir bencana yang terjadi.

4. Aspek Sumber Daya Manusia yang terlatih SATLAK PB Kabupaten Jombang.

4.1 Kualifikasi sumber daya manusia

Kualifikasi sumber daya manusia anggota SATLAK PB Kabupaten Jombang masih terbilang cukup sederhana dan tidak melewati tahap penyaringan yang cukup ketat bagi calon anggotanya. Perekrutan anggota SATLAK PB hanya didasarkan pada latar belakang instansi/lembaga dimana dia bekerja sebelumnya untuk dijadikan Satuan Tugas (SATGAS). Hal ini nantinya akan berpengaruh pada kinerja anggota SATLAK PB dalam menangani bencana yang terjadi. Sphere dalam Pujiono mengungkapkan bahwa terkait Sumber Daya Manusia (SDM), penyediaan SDM yang andal dan terampil sangatlah penting dalam proses penanggulangan bencana, termasuk juga mentalitasnya. Karena dalam proses penanggulangan bencana ini dikerjakan bukan hanya saat terjadi bencana tetapi juga sebelum dan sesudah bencana. Harusnya dalam hal ini kesiapsiagaan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan dan ketrampilan para pejabat pengelola dan petugas atau aparat penanggulangan bencana bersama-sama dengan masyarakat, akan lebih dimantapkan. Begitu pula secara teknis, tenaga-tenaga terampil (*skill*) dimantapkan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sektoralnya. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu lembaga yang professional, dengan diisi oleh para ahli yang paham akan bidangnya, perekrutan yang dilakukan juga harus melalui seleksi pejabat publik yang professional. Sumber daya manusia Indonesia termasuk sumber daya manusia Kabupaten Jombang cukup untuk menempati wilayah tersebut, semua tergantung kepada kemauan pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengusahakan hal tersebut.

4.2 Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting di dalam menanggulangi setiap bencana yang akan terjadi. Kebutuhan untuk mencetak tenaga-tenaga cakap dan berkompeten sangat diperlukan untuk kesiapan SATLAK Kabupaten Jombang saat pra bencana. Hal ini sejalan dengan pendapat Sphere dalam Pujiono bahwa untuk mendapatkan hasil terbaik dengan tujuan mengantisipasi hingga mengupayakan perbaikan

pasca bencana, setiap daerah harus memiliki petugas-petugas yang cakap dan terlatih. Untuk itu diperlukan pendidikan dan pelatihan yang selalu sejalan dengan penemuan teknologi penanganan bencana yang paling mutakhir. Sebenarnya pihak SATLAK PB Kabupaten Jombang tidak tinggal diam dalam meningkatkan kinerja dari anggotanya tersebut. Sosialisasi tentang penanganan bencana alam, pelatihan tindak pencegahan bencana alam dan simulasi tentang penanggulangan bencana alam dengan tujuan meminimalisir dampak bencana alam yang akan terjadi sudah dilakukan dengan cukup baik. Hanya saja kegiatan tersebut hanya dilakukan tidak secara berkelanjutan, tetapi pada waktu musim penghujan tiba. Harusnya hal tersebut dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Meskipun sejumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sudah dilaksanakan, namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan, Unit Operasi PB di tingkat kecamatan, selaku perwakilan dari SATLAK PB di tingkat kabupaten, belum mempunyai kapasitas sumber daya alam yang memadai. Misalnya: Tujuh kecamatan di Kabupaten Jombang yang dijadikan kawasan rawan bencana alam menyatakan tidak ada seseorang yang ahli dalam Unit Operasi PB saat melihat gejala-gejala alam akan terjadi bencana atau tidak. Dapat diambil contoh: di saat hujan terjadi mereka hanya memperkirakan sendiri sesuai pengalamannya apakah nanti akan terjadi banjir atau tidak. Ini membuktikan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan hanya dijadikan wacana saja oleh SATLAK PB dan tidak dapat mengaplikasikannya dengan baik. Untuk itu diperlukan rutinitas dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan kesadaran yang tinggi dari anggota SATLAK PB Kabupaten Jombang bahwa persiapan saat pra bencana adalah hal yang paling penting disamping penanganan pada saat dan setelah terjadinya bencana alam.

Gambar 5

Analisis Upaya Persiapan SATLAK PB Kabupaten Jombang Saat Pra Bencana dengan Metode Analisis Framing

